



Buletin Parlementaria

Nomor 1119/V/VIII/2020 • Agustus 2020



Pimpinan DPR Komitmen Perjuangkan Aspirasi Buruh



4 DPR Minta Kejagung
Tingkatkan Sistem
Keamanan



8 Komisi IV Dukung
Komitmen Pemerintah
untuk Kurangi Impor



9 772614 339005



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad didampingi Pimpinan Baleg saat menemui buruh yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen. Foto: Yoga/MAN

Pimpinan DPR Komitmen Perjuangkan Aspirasi Buruh

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR RI akan bekerja

keras memperjuangkan aspirasi serikat pekerja/buruh pada Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Ia menambahkan, pihaknya telah membentuk tim perumus yang sudah membuat kesepahaman untuk memasukkan aspirasi para serikat pekerja dalam pembahasan kluster ketenagakerjaan pada RUU Ciptaker.

Hal itu diungkapkan Dasco saat menemui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dari kalangan buruh, petani, dan pedagang kaki lima (PKL) yang menggelar aksi unjuk

rasa di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8). Dalam kesempatan itu, Dasco didampingi Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas dan Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya.

“Kita sekarang sudah bersaudara dan kami akan sekeras-kerasnya memperjuangkan apa yang sudah kita sepakatkan dengan tim perumus ke dalam RUU kluster ketenagakerjaan,” komitmen Dasco. Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan itu menyebut, salah satu contoh yang akan dimasukkan dalam aspirasi adalah perselisihan buruh yang sudah memakan waktu bertahun-tahun.

Selain itu, lanjut Dasco, DPR RI akan meminta kepada serikat pekerja untuk mengontrol dan mengawasi pembahasan RUU Ciptaker dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan yang sudah disepakati dengan tim perumus.

“Kalau pembawa acara (koordinator unjuk rasa) bilang mungkin sekarang kita belajar berteman, kalau menurut saya kita sekarang memang sudah berteman. Kami sampaikan salam hangat dari Ketua DPR RI Puan Maharani, yang menyatakan kepada kawan-kawan buruh sekalian bahwa DPR RI akan sekeras kerasnya memperjuangkan aspirasi kawan-kawan sekalian,” tegas politisi Partai Gerindra itu yang disambut tepuk tangan. ■ sf



Ketua DPR Minta Pemerintah Cepat dan Tepat Salurkan Subsidi Gaji Pekerja

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengingatkan Pemerintah untuk lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan pendataan terkait bantuan langsung tunai dalam bentuk subsidi gaji untuk pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Puan meminta kebijakan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi virus Corona (Covid-19) dilakukan bukan hanya cepat, tapi juga harus tepat.

“Kebijakan-kebijakan yang dapat memulihkan perekonomian nasional, juga menyangkut tenaga kerja yang mengalami PHK maupun tidak, dapat dilakukan secara cepat dan tepat,” kata Puan dalam rilis yang diterima *Parlementaria*, Rabu (26/8). Puan menegaskan, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat tidak bisa ditunda, khususnya pada masa pandemi Covid-19 yang membawa dampak luas.

Pemerintah, kata wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V itu, harus mampu menyusun dan

melaksanakan kebijakan yang adil dan berperikemanusiaan untuk seluruh rakyat. Ia meminta bantuan untuk pemulihan ekonomi harus benar-benar nyata membangkitkan perekonomian nasional.

“Pelaksanaan transfer subsidi gaji ke rekening pekerja diharapkan dapat dilakukan cepat dan tepat agar dampak pemulihan ekonomi juga bisa dirasakan para pekerja mandiri bergaji di bawah Rp 5 juta. Pemerintah juga mesti memperhatikan dan mencari solusi yang berperikemanusiaan bagi para pekerja yang tidak memiliki keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan,” pesan politisi PDI-Perjuangan itu.

Seperti diketahui, Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan diberikan kepada pekerja swasta dan Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri Sipil dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta. Selain syarat gaji di bawah Rp 5 juta, pekerja calon penerima juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. ■ sf



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani memantau penyaluran bansos di , Banten. Foto: Gerald/IAN



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)
WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)
PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahapari, S.H., M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
W.K PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Medsos dan Website)

REDAKTUR
Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos. Erlangga Panji Samudro, S.Ikom.
Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P, S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Purntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Riyan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie.

ANALIS MEDIA
Deprisa Citra Akbari, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyawati

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natallio, Fajar Suryanto

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Sartomo, S.S., M.Si (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI
Subadri, S.E., Barliansyah, Fathurahman

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito

FOTOGRAFER ART
Friederick Munchen

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Isandi Mulyana, Yudi Kresna

ADMINISTRASI
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Sistem Keamanan



Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. Foto: Azka/MAN

”

SAYA BERHARAP, PERISTIWA INI TIDAK MENGGANGGU KINERJA KEJAGUNG DALAM MENYELESAIKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA. JANGAN SAMPAI, PERISTIWA INI MENGHAMBAT PROSES HUKUM YANG SEDANG DIJALANKAN

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Lembaga Negara lainnya dapat meningkatkan sistem pengamanan dan pencegahan terhadap potensi kebakaran gedung. Azis menyatakan, DPR RI merasa prihatin dan ingin membantu memulihkan fungsi gedung Kejagung usai kebakaran yang terjadi pada Sabtu (22/8) malam.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini mendorong Kejaksaan dan Kepolisian segera melakukan investigasi menyeluruh atas penyebab kebakaran tersebut. Hal itu disampaikan Azis dalam keterangan resminya yang

diterima *Parlementaria*, Minggu (23/8).

Azis mengungkapkan, DPR RI akan membantu Kejagung dalam semua hal yang dianggap perlu untuk memulihkan hal-hal yang dianggap perlu.

Tujuannya, ujar Azis, agar masyarakat mendapatkan informasi yang tidak simpang siur terkait kebakaran yang menimpa gedung Kejagung.

“Saya prihatin dan berharap publik serta pihak lain tidak menyebarkan asumsi yang bersifat spekulatif atas peristiwa ini, sampai ada pernyataan resmi dari pihak berwenang terkait musibah ini,” tegas Azis.

Azis mengharapkan, pekerjaan rumah dan tugas Kejagung terus berjalan baik serta tidak terganggu oleh peristiwa kebakaran tersebut.”

Saya berharap, peristiwa ini tidak mengganggu kinerja Kejagung dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya. Jangan sampai, peristiwa ini menghambat proses hukum yang sedang dijalankan,” pungkas politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Sebagaimana diketahui, peristiwa kebakaran gedung Kejagung di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dilaporkan terjadi Sabtu (22/8/2020), pukul 19.10 WIB. Api dilaporkan berasal dari lantai enam gedung utama Kantor Korps Adhyaksa tersebut, lalu menjalar ke lantai 5, 4, 3, 2, dan 1. Selain membakar ruang kerja Kepala Kejaksaan Agung, api juga membakar ruangan bidang intelijen, kepegawaian, dan administrasi. ■ pun/sf

Gus Ami Ingin Masyarakat Tingkatkan Solidaritas Kemanusiaan di Tengah Pandemi

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan dampak pandemi Covid-19

hingga kini terus membuat kelumpuhan ekonomi di seluruh negara di dunia. Akibatnya, angka pengangguran kian bertambah. Bahkan di Indonesia, pertumbuhan ekonomi anjlok menjadi minus 5,32 persen. Untuk itu, ia mengajak semua pihak berjuang bersama dan meningkatkan solidaritas kemanusiaan sampai vaksin Covid-19 diluncurkan.

“Pemerintah kita akui sudah bekerja keras untuk mengatasi dampak pandemi ini, terutama masalah ekonomi bagi masyarakat miskin melalui bantuan sembako, BLT, dan program-program lainnya dari berbagai kementerian. Para dermawan di luar koordinasi Pemerintah, termasuk partai politik pun ikut menjadi bagian penyelamat perut warga di tengah segala keterbatasan. Inilah wajah

Indonesia yang selalu bergotong royong dalam menghadapi masalah apa pun itu,” katanya dalam keterangan persnya yang diterima **Parlementaria**, Selasa (26/8).

Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) yang akrab disapa Gus Ami ini meminta semua pihak, agar seluruh elemen masyarakat tak mengendorkan semangat solidaritas kemanusiaan di tengah pandemi Covid-19.

Karena itu, dia mendukung penuh dibentuknya aplikasi ‘Kupon Makan’ guna memperkuat solidaritas dan gotong royong di antara sesama warga Indonesia. Kupon Makan adalah *platform online* yang menyalurkan donasi berupa kupon digital yang dapat ditukar dengan makanan atau sembako di warung terdekat.

“Aplikasi ini akan mempermudah para dermawan untuk membantu sesamanya yang sedang kesusahan dengan aman dan mudah, cukup dari genggamannya *smartphone*-nya di rumah

masing-masing, dan dapat ditujukan ke siapapun, baik yang mereka kenal langsung maupun tidak, *by name by address by number phone*, secara tepat dan akurat, tanpa biaya alias gratis, dan terjamin transparan, aman, dan terpercaya,” tandas Gus Ami.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengaku, ide aplikasi Kupon Makan ini muncul saat mencuatnya pandemi Covid-19 di bulan Maret 2020 lalu. “Pada dasarnya kita ingin berusaha membantu memenuhi makan sehari-hari masyarakat yang terdampak Covid-19. Kita juga ingin para pedagang pun dalam pendapatannya bisa meningkat,” ungkap Daniel saat peluncuran Kupon Makan.

Menurut Daniel yang juga *Co-Founder* aplikasi Kupon Makan itu, saat Pemerintah fokus membantu masyarakat miskin yang terdampak melalui berbagai macam program dan bantuan sosial. Sisi lain, tak sedikit masyarakat ekonomi menengah yang juga kehilangan mata pencahariannya akibat pandemi, justru luput dari perhatian. “Nah, yang kita khawatirkan bukan untuk memenuhi kebutuhan macam-macam, tetapi untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya saja mungkin sulit karena kehilangan pendapatannya sehari-hari,” tuturnya.

Daniel menambahkan, *platform digital* ini diwujudkan untuk menjembatani para donatur dengan mitra kepada masyarakat yang terdampak sebagai penerima kupon, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bisa bergerak dan ekonomi diharapkan dapat kembali berjalan sesuai target. ■ **ann/sf**



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan saat mewakili Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di acara *launching* aplikasi ‘Kupon Makan’ di kawasan Jakarta Selatan. Foto: Runi/MAN

Komisi II Gali Masukan RUU Pemilu dari Akademisi Untirta

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo berkunjung ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) untuk menyerap masukan dari akademisi Untirta guna memperkaya materi muatan yang sebagai penyempurna RUU Pemilu.

“UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah cukup panjang perjalanannya. Kita diingatkan oleh akademisi Untirta tentang bagaimana penyusunan UU yang sesuai dengan UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, legal draftingnya harus cermat betul baik dari judul, isi dan selanjutnya,” ujar Arif di Kampus Untirta, Kota Serang, Banten, Rabu (19/8).

Dalam pertemuan tersebut, lanjut politisi PDI-Perjuangan itu, pihaknya mendapat masukan mengenai panitia rekrutmen dan seleksi anggota KPU, Bawaslu, DKPP dan seterusnya agar lebih diperhatikan dan juga mengenai penyelesaian sengketa Pemilu dari berbagai perspektif.

“Materi yang sifatnya teknis seperti panitia rekrutmen dan seleksi anggota KPU, Bawaslu, DKPP agar lebih diperhatikan guna menjamin kelembagaan penyelenggaraan yang lebih baik, lebih kuat, lebih demokratis.

Juga menyangkut penyelesaian sengketa Pemilu dari berbagai perspektif, apakah itu sengketa administrasi, sengketa antar lembaga penyelenggara maupun sengketa pemilihan,” ujar Arif.

Sedangkan masukan mengenai *e-voting*, Arif menilai hal ini harus lebih cermat dan hati-hati. Bukan hanya dari sisi penyelenggara, tetapi juga dari sisi teknologi informatika yang harus kredibel serta kesiapan masyarakat. Sebab hal itu bisa menjadi masalah baru dan memunculkan suatu insiniasi bahwa mereka yang menguasai teknologi itulah yang akan mengambil keuntungan untuk kepentingan politiknya. ■ eno/es



Tim Kunker Panja RUU Pemilu Komisi II DPR RI saat berkunjung ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). Kota Serang, Banten. Foto: Eno/MAN

Komisi III dan Pemerintah Bahas RUU Mahkamah Konstitusi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir memimpin Rapat Kerja bersama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna Laoly serta perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri) RI, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, terkait dengan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Adies mengungkapkan, ada empat poin pengaturan dalam RUU Mahkamah Konstitusi, pertama soal kedudukan, susunan, dan kekuasaan Mahkamah Konstitusi, kedua tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi. Ketiga soal kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi serta dewan etik hakim konstitusi, dan yang keempat putusan Mahkamah Konstitusi.

Dia juga memaparkan, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi perlu dilakukan karena, ada beberapa ketentuan pasal dalam aturan yang sebelumnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan konstitusional bersyarat oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

“Perubahan pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dilatarbelakangi karena terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan,” jelas Adies di ruang rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, Senin (24/8).

Adies juga mengungkapkan,



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir dan Pimpinan Komisi III DPR RI menerima draf RUU Mahkamah Konstitusi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna Laoly. Foto: Runi/MAN

dalam RUU Mahkamah Konstitusi ini, DPR juga memandang perlu untuk mengatur ketentuan peralihan agar jaminan kepastian hukum yang adil bagi pemohon serta hakim konstitusi, yang saat ini masih mengemban amanah sebagai negarawan menjaga konstitusi tetap terjamin secara konstitusional. “Kami sampaikan demi mendapat persetujuan bersama dengan pemerintah,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar.

Pimpinan DPR RI telah

menugaskan Komisi III DPR RI untuk membahas RUU Mahkamah Konstitusi, untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama sama dengan pemerintah. Komisi III DPR RI melaksanakan pembahasan tentang RUU Mahkamah Konstitusi bersama dengan pemerintah, berdasarkan atas keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus pada tanggal 15 Juli 2020, kemudian dituangkan dalam rapat Pimpinan DPR RI pada 20 Juli 2020. ■ eko/es

Komisi IV Dukung Komitmen Pemerintah untuk Kurangi Impor



Ketua Komisi IV DPR RI Sudin. Foto: Eot/MAN

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyatakan persetujuannya atas pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang akan mengurangi impor. Namun Sudin juga mengkritik pernyataan Mentan tersebut, karena ternyata implementasinya di lapangan justru tidak seperti yang diharapkan. Seperti Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih, hingga saat ini masih belum dibatasi.

“Hari ini, RPIH Bawang Putih masih satu juta ton lebih, kenapa tidak dibatasi. Kebutuhan kita berapa. Contoh, 500 ribu, lalu yang diproduksi di dalam negeri misalkan 100 ribu, artinya cukup 400 ribu saja yang diimpor. Tetapi kita harus yakin dahulu

apakah produksi kita mencapai 100 ribu. Kalau memang yakin, maka setop dan infokan kepada semua importir. Dan sampai hari ini saya belum mendapat laporan tentang wajib tanam,” tandas Sudin dalam agenda Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (25/8).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyoroti optimisme dari Pemerintah dalam menghadapi Covid-19 ini terutama di bidang pertanian. Dikatakannya, bidang pertanian adalah garda terdepan yang mampu menyelamatkan bangsa ini. Tetapi karena para petani itu bukan kaum terorganisir dan yang jarang bikin opini di media, maka seringkali tidak mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari negara.



KITA HARUS YAKIN DAHULU APAKAH PRODUKSI KITA MENCAPAI 100 RIBU. KALAU MEMANG YAKIN, MAKA SETOP DAN INFOKAN KEPADA SEMUA IMPORTIR

“Hari ini di kalangan buruh yang gajinya di bawah 5 juta rupiah mendapat bantuan alokasi dana sebesar Rp 600 ribu setiap bulan. Tetapi buruh tani yang notabene penghasilannya tidak mencapai satu juta per bulan justru tidak menjadi bagian yang mendapatkan subsidi. Padahal merekalah garda terdepan untuk menyelesaikan bangsa ini. Bangsa ini masih bisa aman kalau kebutuhan pokoknya masih tersedia,” ucap politisi Partai Golkar itu.

Ia mengingatkan, hal yang harus disikapi secara bersama-sama adalah, para petani genjot diri pada hari ini untuk menanam kembali pada musim tanam yang ketiga, tetapi di lapangan ternyata pupuk urea tidak ada. “Apakah salah dalam pendistribusian, penghitungan, atau subsidi yang belum sampai ke pabrik pupuk. Oleh karenanya, mohon hal ini dijelaskan secara komprehensif, karena hampir semua wilayah mengalami hal yang sama,” tutur Dedi. ■ dep/es

Komisi V **Desak** Kemenhub Adil Beri Ruang PBM Non-BUMN

Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan ruang usaha yang adil kepada Perusahaan Bongkar Muat (PBM) non-BUMN dalam melakukan kegiatan bongkar muat sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Demikian termaktub dalam kesimpulan yang disampaikan Wakil

Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Ditjen Hubla Kemenhub, yang digelar secara fisik dan virtual di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8).

Serta, sambung politisi F-Golkar itu, Komisi V DPR RI meminta Ditjen Hubla Kemenhub untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan

unit-unit usaha jasanya di Pelabuhan. Lebih lanjut, pihaknya juga meminta Ditjen Hubla Kemenhub untuk mendalami kembali secara komprehensif Peraturan Menhub Nomor 152 Tahun 2016.

“Yakni, tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan ke Kapal. Karena, dinilai mengancam eksistensi PBM non-BUMN yang selama ini beraktivitas di Pelabuhan,” tutup legislator dapil Sultra itu. ■ pun/sf

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae. Foto: Runi/MAN



Ketatkan Penerapan Protokol Covid pada Industri

Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty mendesak Kementerian Perindustrian untuk memperketat pengawasan penerapan protokol kesehatan pada dunia perindustrian di masa pandemi Covid-19. Evita memberi apresiasi bahwa Kemenperin telah berani kembali mengaktivasi sektor industri, namun ia mengaku syok ketika mendengar informasi bahwa ada 238 karyawan di satu pabrik yang positif terinfeksi virus Corona.

Hal tersebut diutarakannya dalam RDP Komisi VI DPR RI dengan Eselon I Kemenperin dan Kementerian BUMN, serta Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengenai penyampaian

laporan keuangan masing-masing K/L di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8). Menurutnya ada kelalaian mengenai standar penerapan protokol Covid-19 yang masih diabaikan oleh beberapa perusahaan industri.

“Ini membuktikan bahwa protokol kesehatan itu tidak benar-benar dijalankan di industri. Kita tidak menginginkan industri ini menjadi klaster baru dari penyebaran daripada Covid-19. Jadi mungkin ini harus menjadi perhatian bahwa kembali agar kawasan industri itu dipertegas tentang bagaimana protokol kesehatan yang harus mereka lakukan,” tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Wakil Ketua BURT DPR RI ini pun

”

AGAR KAWASAN INDUSTRI ITU DIPERTEGAS TENTANG BAGAIMANA PROTOKOL KESEHATAN YANG HARUS MEREKA LAKUKAN

tidak ingin nantinya sektor industri menjadi klaster baru penyebaran virus Corona (Covid-19). Untuk itu menurutnya bagi tempat industri yang sudah menjadi klaster sebaiknya kembali ditutup sementara, guna dilakukan penyemprotan disinfektan, dan bagi yang belum, sebaiknya ada pengawasan yang ketat mengenai protokol kesehatan yang wajib diterapkan.

“Kita syok juga kemarin kita baca berita di Bekasi ada 238 karyawan LG yang positif. Jadi mungkin ini harus menjadi perhatian bahwa kembali agar kawasan industri itu dipertegas tentang bagaimana protokol kesehatan yang harus mereka lakukan. Kemudian yang sudah menjadi klaster sebaiknya ditutup dulu sampai dilakukan penyemprotan dan lainnya,” imbuh legislator dapil Jawa Tengah III itu.

Terakhir ia berharap agar vaksin Covid-19 dapat segera ditemukan dan diproduksi oleh Pemerintah agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal. “Kementerian BUMN ini sudah ke China, sudah kemana-mana dalam rangka menguji coba vaksin ini untuk kemudian akan bisa hadir di tengah-tengah kita sehingga *new normal* bisa menjadi normal kembali ketika kita nanti sudah memiliki vaksin,” harap Evita sambil mengakhiri. ■ **er/sf**



Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty. Foto: Azka/MAN

Komisi VII Pertanyakan Keberlanjutan Ketersediaan Suplai Batu Bara



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian. Foto: Azka/MAN

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian mempertanyakan keberlanjutan ketersediaan suplai batu bara hingga 30-40 tahun yang akan datang. Hal tersebut diungkapkan Ramson dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan Direktur Utama PT. PLN (Persero) Zulkifli Zaini di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8).

“Kalau disampaikan proyek pembangkit listrik 35000 MW dengan 7000 MW akan selesai di tahun 2023. Kalau itu sudah selesai, nanti kebutuhan energi premier batubara berapa juta metrik ton per tahunnya. Karena dari pemaparan Pak Dirut bahwa kalau sudah selesai yang dibangun 35000 MW dan 7000 MW tersebut, baru akan memproduksi sekitar 30-40 tahun yang akan datang. Berarti

dibutuhkan keterjaminan suplai batu bara sampai 30-40 tahun mendatang. Apa yang akan dilakukan PLN?” tanya Ramson.

Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya setuju jika PLN masuk ke sektor hulu energi primer batu bara untuk keamanan energi, karena memang porsinya masih banyak. Sehingga jika kelak kebutuhan batu bara sekitar 150 juta metrik ton, maka tidak akan masalah. Namun jika kemudian semua itu diekspor, maka akan sangat membahayakan kelanjutan ketersediaan listrik di Indonesia. Kecuali PLN merombak pembangkit listrik ini dengan energi baru terbarukan (EBT) dalam waktu cepat.

“Tapi saya lihat kemampuan untuk itu tidak ada. Negeri ini untuk membangun PLTA saja modalnya kurang pinjam sana, pinjam sini, anak perusahaan kerja sama dengan IPP

(Independent Power Producer) atau unit pembangkit swasta. Kita harus realistis juga,” ujar politisi Fraksi Partai Gerindra.

Ditambahkannya, soal keberlanjutan ketersediaan energi listrik untuk masyarakat di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Indonesia memang banyak potensinya, tapi PLN atau Pemerintah belum mampu mengeksplorasinya, karena itu terpecah-pecah. Sekarang saja, tahun 2020 ini Indonesia akan defisit Rp 1.050 triliun, sehingga membutuhkan Rp 1.400 triliun lagi, belum lagi utang negara ke pihak PLN sebesar Rp 45 triliun.

“Maksud saya ini harus dilihat kedepan, jangan akhirnya PLN dijual kalau tidak sanggup. Sekarang Pertamina di-*subholding*-kan saya masih setuju. Tapi kalau yang dijual itu maksudnya di IPO, hulu dan logistiknya saya tolak seratus persen. Karena kalau untuk kepentingan rakyat dari IPO tidak bisa lagi disubsidi. Oleh karena itu tadi saya katakan, diperlukan data itu untuk memikirkan kepentingan ketersediaan energi listrik dalam jangka waktu seperti yang disampaikan 30-40 tahun yang akan datang,”paparnya.

Di akhir rapat, dalam salah satu kesimpulannya, Komisi VII DPR RI mendesak Dirut PT PLN (persero) untuk menyampaikan data pembangunan program 35000 MW dan 7000 MW dan pembangkit listrik yang masih tertunda secara terperinci, termasuk analisa *supply* dan *demand*, lokasi, progres pemasaran dan rencana penyelesaiannya dalam pemenuhan kebutuhan listrik seluruh rakyat Indonesia untuk didalami pada panitia kerja (Panja) listrik Komisi VII DPR RI.

■ ayu/es

KMA 515 Tahun 2020 Harus Dijalankan dengan Benar

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menilai kebijakan Menteri Agama menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 515 Tahun 2020 dengan tujuan meringankan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi keagamaan negeri atas dampak bencana wabah Covid-19 sudah tepat. Namun ia mengingatkan, keputusan tersebut harus diimplementasikan dengan benar agar berdampak besar kepada mahasiswa.

“KMA Nomor 515 ini sudah tepat, tinggal bagaimana dijalkannya oleh perguruan tinggi

”

JIKA ADA HAMBATAN SAMPAIKAN DAN TERBUKA JANGAN NANTI JADI PERCUMA KEPUTUSANNYA

keagamaannya. Jika ada hambatan sampaikan dan terbuka jangan nanti jadi percuma keputusannya,” imbuh Yandri saat memimpin RDP Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Pendis Kementerian Agama dan Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8).

Yandri mengatakan, Kemenag harus memberikan sanksi tegas bagi perguruan tinggi keagamaan yang tidak menjalankan KMA Nomor 55 tersebut. “Pak Dirjen, apa keputusan tegasnya jika perguruan tinggi keagamaan tidak menjalankan KMA Nomor 55 tersebut dengan benar. Jangan sampai beban mahasiswa bertambah karena saat ini beli makan saja susah, apalagi bagi yang orang tuanya terkena dampak pandemi,” wanti Yandri.

Lebih lanjut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menyatakan Menag harus mempersiapkan kebutuhan kuliah *online* jarak jauh dengan benar, sehingga mahasiswa yang tidak memiliki teknologi dapat tetap belajar. “Bagaimana kesiapannya juga mengenai kuliah *online* ini, atau jarak jauh, tentu harus matang mulai dari dosennya, sarana prasana kampus hingga teknologi informasinya,”

pesan legislator dapil Banten II

ini. ■ tn/f

Ketua Komisi VIII DPR RI
Yandri Susanto. Foto: Gerald/MAN



Pemerintah Harus Cari Solusi Bantuan Subsidi bagi Pekerja Informal



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu. Foto: Jaka/MAN

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Covid-19. Hal ini dianggap sebagai salah satu upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 pada sektor tenaga kerja.

Syarat bagi calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diatur dalam Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 menjadi perhatian serius di Komisi IX DPR RI. Pasalnya, hanya mereka yang menjadi peserta BP Jamsostek dan bergaji di bawah lima juta rupiah yang akan menerima subsidi dari Pemerintah.

Padahal ada cukup banyak Guru Honorer dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang setiap bulannya mendapatkan upah tidak lebih dari satu juta rupiah, bahkan tidak sedikit yang hanya mendapat upah hanya Rp 200-Rp 300 ribu per bulan.

Saat rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Dirut BP Jamsostek di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8), Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu mengatakan, dalam peraturan tersebut yang berhak mendapatkan BSU adalah peserta BP Jamsostek yang gajinya di bawah Rp 5 juta.

“Dalam ketentuan yang ada, mereka yang berhak mendapatkan BSU adalah peserta BP Jamsostek yang gajinya di bawah Rp 5 juta, pasti perusahaan-perusahaan *gede* yang akan mendapatkan. Bukan saya tidak suka

mereka mendapatkan bantuan, tapi ada yang lebih berhak mendapatkan subsidi itu seperti guru honorer dan PTT yang gajinya bahkan di bawah satu juta rupiah,” ungkap Sri Rahayu.

Untuk itu, Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah lebih memperhatikan dan mencari solusi untuk pekerja yang tidak menjadi anggota BP Jamsostek, pekerja bukan penerima upah yang belum mendapatkan bantuan sosial dengan memperhatikan prinsip keadilan.

“Karena ini program mendadak yang muncul karena pandemi Covid-19, maka kami minta pemerintah melakukan diskusi mendalam sehingga mereka (bukan peserta BP Jamsostek, pekerja bukan penerima upah) yang belum mendapatkan kesejahteraan yang memadai bisa mendapatkan BLT dari pemerintah ini,” ujar politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Ia menilai, masih banyak masyarakat yang bukan peserta BP Jamsostek namun sangat membutuhkan bantuan tersebut. Misalnya guru honorer di daerah-daerah terpencil hingga para pekerja informal.

“Mengacu pada data BPS, pekerja informal ada 70,49 juta orang. Sementara ini bantuan yang ada hanya untuk 15,7 juta orang dengan syarat gaji di bawah Rp 5 juta. Klasifikasi seperti ini kan tidak ada, tolong rakyat yang lain diperhatikan. Jangan sampai kita fokus pada sebagian kelompok dan menafikan kelompok lainnya. Adil itu artinya menyertakan warga negara sehingga kita bisa kelola negara ini dengan baik dan keuangannya tepat sasaran,” tegasnya. ■ rmm/es

Panja Pariwisata Serahkan Rekomendasi Pemulihan Pariwisata Nasional



Ketua Panja Pemulihan Pariwisata Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudien menyerahkan rekomendasi kepada Menparekraf Wishnutama Kusubandio. Foto: Jaka/MAN

Panitia Kerja (Panja) Pemulihan Pariwisata Komisi X DPR RI menyerahkan 24 rekomendasi penting untuk pemulihan pariwisata nasional, setelah beberapa bulan terakhir terdampak wabah Covid-19. Sejumlah destinasi wisata yang sudah lama ditutup, kini bisa dibuka kembali dengan berbagai rekomendasi dari Komisi X DPR RI.

Ketua Panja Pemulihan Pariwisata Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudien menyerahkan lima rekomendasi kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8). Pada poin pertama rekomendasi itu, Komisi X mendesak Pemerintah merumuskan kebijakan yang konsisten

di bidang pariwisata sekaligus untuk membangun kepercayaan publik pada pariwisata nasional.

Hetifah berharap, Kemenparekraf benar-benar menindaklanjuti rekomendasi Panja. "Kami telah bekerja secara maraton sejak 6 Mei hingga 15 Juli 2020. Mengundang berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku ekraf, komunitas pariwisata, akademisi, dan lembaga pendidikan, serta kementerian/lembaga terkait. Jadi Insya Allah laporan ini komprehensif dan telah mempertimbangkan aspirasi semua pihak," paparnya.

Menparekraf Wishnutama mengapresiasi atas semua rekomendasi Panja ini. Dikatakannya, ini merupakan kolaborasi baik antara legislatif dan

eksekutif. Selanjutnya, rekomendasi ini segera ditelaah dan ditindaklanjuti. Diungkap Hetifah, laporan Panja Pemulihan Pariwisata terdiri dari 6 bab yang berisi 24 rekomendasi.

Rekomendasi tersebut tidak saja diarahkan kepada Kemenparekraf, tapi juga kepada Pemda, BUMN, pelaku pariwisata, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Untuk Kemenparekraf sendiri ada 10 poin besar rekomendasi yang diantaranya pembuatan *big data* pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi. Selain itu, perlu ada pembuatan gugus tugas manajemen pemulihan pariwisata untuk menjembatani permasalahan dan mengakselerasi pemulihan pariwisata nasional. ■ mh/sf

Bappenas Perlu Evaluasi Efektivitas Target Pembangunan di Kala Pandemi

Ketidakmampuan Pemerintah dalam mencapai sejumlah target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, membuat Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengungkapkan kegelisahannya tentang sejauh mana peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam mengawal perencanaan pembangunan. Padahal, sebagaimana menjadi tujuan pembangunan yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, pembangunan diperuntukkan semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

“Setiap tahun dalam pembahasan APBN, kita selalu membahas indikator kesejahteraan, mulai dari angka pengangguran dan kemiskinan, indeks

pembangunan manusia (IPM), *Gini Ratio*, tetapi hari ini meskipun kita lihat ada perbaikan, itu tidak signifikan dengan peningkatan anggaran (APBN, **red**) kita. Untuk itu kita minta supaya Bappenas melakukan evaluasi kembali terhadap efektivitas pembangunan kita ini seperti apa,” kata Marwan kepada *Parlementaria* di sela-sela Rapat Kerja membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Bappenas pada APBN 2019 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).

Marwan, yang juga menjabat Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, sempat mempertanyakan program inovasi pembangunan yang dijalankan oleh Bappenas. “Sebab dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, yang kita lihat model kita membangun dan model kita membahas, ya begini-begini saja. Yang meningkat anggarannya tetapi

efektivitasnya untuk kesejahteraan masyarakat dengan parameter (indikator, **red**) yang disebutkan dalam APBN, belum terlihat secara signifikan,” imbuh Marwan.

Di tengah situasi Covid-19, politisi Partai Demokrat itu menilai bahwa semua perencanaan pembangunan baik untuk jangka menengah (RPJMN) maupun jangka panjang (RPJMP) baik pada 2020 ataupun 2019, masih dirancang pada situasi normal sebelum pandemi. “Pasca adanya Covid, sebetulnya kita sudah punya instrumen yang disebut dengan Perppu 1 Tahun 2020 yang sekarang sudah menjadi undang-undang, tetapi instrumen itu belum cukup, harus dievaluasi kembali terkait perencanaan pembangunan ke depannya seperti apa, karena kita melihat sumber-sumber penghidupan masyarakat berubah dampak pandemi,” tegas legislator dapil Lampung II itu.

Meski demikian, Marwan menilai tidak terlalu optimis dengan target yang telah ditetapkan pemerintah dalam APBN 2021. Ia mencontohkan bahwa pada tahun mendatang, Pemerintah menargetkan penerimaan negara sekitar Rp 1.700 triliun, padahal capaian pada Semester I/2020 sudah berkontraksi 12 persen dengan target yang lebih rendah. “Bagaimana pada 2021 nantinya, kita belum tahu rencana pemerintah *‘how to achieve’*, bagaimana mereka mencapai itu kita belum tahu. Kalau ini dibangun untuk menciptakan optimisme masyarakat, itu *fine*, kita sepakat. Tetapi harus dievaluasi kembali supaya *down to earth*, supaya lebih resisten, supaya kita bisa menerima kenyataan dan tidak salah langkah,” pesan Marwan. ■ **alw/sf**



Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan. Foto: Arief/MAN

Timus Baleg-Serikat Pekerja Capai Kesepahaman

Klaster paling krusial dan penting dalam RUU Cipta Kerja (Ciptaker) adalah soal ketenagakerjaan.

Tim perumus (timus) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendapat banyak poin penting kesepahaman dengan serikat pekerja. Poin-poin kesepahaman ini akan dimasukkan ke dalam daftar investarisasi masalah (DIM).

Anggota Baleg DPR RI Heri Gunawan yang mengikuti pertemuan dengan serikat pekerja di Kawasan Senayan, Jakarta, Kamis-Jumat (21-22/8) menjelaskan, poin penting itu diantaranya, memuat hasil putusan Mahkamah Konstitusi soal perijinan kerja waktu tertentu, upah, pesangon, hubungan kerja, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan jaminan sosial.

“Semua kesepahaman harus didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat,” ungkap politisi Partai Gerindra itu. Sementara menyangkut sanksi pidana ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker dikembalikan sesuai ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berkenaan dengan sanksi pidana ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja, sambung legislator asal

Sukabumi, Jawa Barat itu, sepenuhnya akan dikembalikan sesuai formula ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan dengan proses yang dipertimbangkan secara seksama.

“Berkenaan dengan hubungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri, maka pengaturannya dapat dimasukkan di dalam RUU Cipta Kerja dan terbuka terhadap masukan publik,” tutur Hergun, sapaan akrabnya.

Pertemuan Timus Baleg DPR dengan serikat pekerja ini dikemas dalam *Forum Group Discussion* (FGD) yang semuanya difasilitasi dengan iuran para Anggota Baleg, lantaran dua hari pertemuan tersebut merupakan hari libur dan cuti bersama. ■ mh/sf

Anggota Baleg DPR RI Heri Gunawan.
Foto: Arief/MAN





Peningkatan Alokasi APBN Harus Ciptakan Lonjakan Kualitas Hidup Rakyat



Anggota Banggar DPR RI Dolfie O.F.P. Foto: Eot/MAN

Dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan Menteri Keuangan RI yang membahas RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019, Anggota Banggar DPR RI Dolfie O.F.P mengapresiasi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan atas capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil audit pemeriksaan BPK.

Meski demikian demikian, Dolfie juga mempertanyakan apakah dengan adanya peningkatan besaran belanja APBN antara tahun 2010 dengan tahun 2019, yang nilai mencapai lebih dari dua kali lipat tersebut, telah sejalan dengan meningkatnya kualitas kehidupan seluruh rakyat Indonesia.

“Jika kita bandingkan dengan tahun 2010, belanja (APBN) kita hanya Rp 1.009 triliun, dan sekarang naik lebih dua kali lipatnya yakni Rp 2.309 triliun. Pertanyaannya, jika BPK sudah mengaudit serta melakukan pemeriksaan, bagaimana laporan keuangan pemerintah pusat, apakah sudah sesuai atau belum dengan standar akuntansi pemerintah. Menurut kami adalah tugas DPR untuk menilai, apakah belanja negara itu sudah efektif dan efisien dalam memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat,” ujar Dolfie di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8).

Ia memaparkan, amanat Undang-Undang Dasar menyebutkan, APBN merupakan wujud pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, sambung Dolfie, anggaran belanja sudah di alokasikan untuk anggaran dan program, baik untuk sekolah, infrastruktur, bansos, penyediaan obat, *bea siswa*, dan lain sebagainya dan menghabiskan anggaran sebesar Rp 2.309 triliun untuk berbagai macam belanja.

“Kalau kita ikuti undang-undang fakir miskin tentang tujuh kebutuhan dasar, mulai dari pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hingga pelayanan sosial, dari aspek pangan, apakah rakyat Indonesia sekarang pangannya sudah memenuhi gizi yang cukup,” tukas politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Dari aspek kesehatan, lanjut Dolfie, apakah saat ini akses terhadap pelayanan kesehatan sudah mudah bagi rakyat Indonesia. “Sudah punya kartu BPJS Kesehatan saja belum tentu mendapatkan pelayanan kesehatan,” tandasnya. Ia menambahkan, di bidang pendidikan, apakah sekarang akses untuk mendapatkan pendidikan, baik tingkat sekolah dasar, menengah, ataupun perguruan tinggi juga sudah mudah bagi rakyat Indonesia.

“Hal-hal inilah yang mungkin kami perlu mendapatkan penjelasan, bahwa alokasi program dan belanja APBN yang meningkat dari sebelumnya pada tahun 2010 sebesar Rp 1.009 triliun dan di tahun 2019 menjadi Rp 2.309 triliun juga meningkatkan kualitas kehidupan rakyat,” tegasnya. Hal itu harus bisa ditunjukkan Pemerintah agar DPR yakin bahwa belanja-belanja tersebut memang sudah efektif. ■ **dep/es**

Parlemen Harus Terus Berinovasi Ringankan Beban Masyarakat

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyebut parlemen perlu melakukan terobosan agar bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan Puan saat berpidato dalam acara Inter-Parliamentary Union (IPU) 5th World Conference of Speakers of Parliament yang berlangsung secara virtual pada 19-20 Agustus 2020.

Puan menekankan, di tengah kekhawatiran rakyat dan beban ekonomi yang bertambah, parlemen harus menunjukkan bahwa pihaknya tidak akan berhenti sejenak pun serta terus bekerja untuk rakyat. Selain itu, dirinya menghimbau kepada segenap Anggota Parlemen untuk semakin cepat

dalam menghasilkan undang-undang yang dapat membantu mengatasi dampak pandemi Covid-19, di samping harus tetap menyerap aspirasi rakyat.

“Justru di saat seperti inilah mereka (rakyat-red) ingin merasa lebih dekat dekat parlemen untuk menyampaikan aspirasinya. Karena itu, diperlukan terobosan-terobosan dalam cara kerja parlemen di tengah pandemi Covid-19,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut, di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8).

Lebih lanjut, Puan menyebut terobosan untuk membuat kehadiran parlemen lebih dirasakan menjadi hal penting dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat. Menurutnya,

kehadiran parlemen yang memberi dampak positif inilah yang akan membuat masyarakat memandang parlemen sebagai institusi yang tetap relevan dalam kehidupan mereka.

Sejumlah terobosan itulah yang disebut Puan telah dilakukan oleh DPR RI untuk bisa tetap mendengar aspirasi dan membantu mengatasi bertambahnya persoalan yang dirasakan masyarakat Tanah Air akibat pandemi Covid-19 ini.

Di Indonesia sendiri, anggota parlemen sudah menggunakan cara-cara baru di dalam kenormalan baru untuk memastikan tugas DPR dapat terus berjalan dengan lancar dan produktif, termasuk menggunakan kombinasi metode virtual dan tatap muka dalam pelaksanaan rapat.

“Kami juga telah mengembangkan Sistem Informasi Legislasi di *website* DPR yang dapat dengan mudah digunakan oleh siapa pun yang mengaksesnya. DPR juga hadir di media sosial dalam bentuk saluran layanan pengaduan *mobile* dan *online* agar rakyat dapat lebih mudah menyampaikan aspirasinya,” ucap politisi partai PDI-Perjuangan itu.

Kendati demikian, Puan menyebut DPR akan terus melakukan inovasi dan terobosan demi memberi dampak positif bagi masyarakat. “Baleg DPR juga telah menggunakan mekanisme partisipasi publik *online* dalam pembahasan RUU yang menjadi usulan DPR. Para pakar, akademisi, *think-tank*, dan organisasi masyarakat bisa mengambil bagian dalam proses ini. Kami di Indonesia yakin bahwa masih banyak lagi cara-cara baru yang diterapkan untuk menjembatani kesenjangan antara parlemen dengan rakyat,” tutup legislator dapil Jawa Tengah V itu. ■ *alw/es*



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani didampingi Pimpinan BKSAP DPR RI menghadiri Inter-Parliamentary Union (IPU) 5th World Conference of Speakers of Parliament yang berlangsung secara virtual. Foto: Emani/MAN

BKSAP Serukan Penguatan Multilateralisme pada Pertemuan Ketua Parlemen Dunia

Delegasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menghadiri *The Fifth World Conference*

of Speakers of Parliament yang merupakan sidang tahunan ketua-ketua parlemen seluruh dunia, dimana salah satu pembicara kuncinya adalah Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Turut hadir secara virtual pada sidang ini, Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dan Wakil Ketua BKSAP Charles Honoris.

Sidang yang diinisiasi oleh *Inter Parliamentary Union* (IPU) dengan Parlemen Austria sebagai tuan rumah ini diselenggarakan secara virtual pada tanggal 19-20 Agustus 2020. Sidang ini menghasilkan *Declaration on Parliamentary Leadership for More*

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Charles Honoris. Foto: Erman/MAN

Effective Multilateralism that Delivers Peace and Sustainable Development for the People and Planet.

Dalam pembahasan *outcome* dari deklarasi tersebut, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Charles Honoris mengajukan beberapa usulan diantaranya penguatan multilateralisme. Mengingat dalam menghadapi pandemi global, dibutuhkan kerja sama dan persatuan lebih dari sebelumnya. Seluruh elemen harus bekerja sama dalam semangat gotong-royong.

“Kami menggarisbawahi bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah multilateralisme yang efektif.

Dunia tengah membutuhkan kerja sama internasional dan aksi-aksi di tataran multilateral untuk mencari solusi global. Ini bukan waktu yang tepat bagi negara-negara untuk terfragmentasi. Solidaritas internasional menjadi kunci

”

INSTITUSI PARLEMEN HARUS MAMPU BERADAPTASI DENGAN TANTANGAN SAAT INI DAN MAMPU MENJALANKAN FUNGSI KONSTITUSIONAL SECARA EFEKTIF

untuk kita bersama-sama keluar dari krisis multidimensional ini,” ujar Charles di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8).

Situasi pandemi, lanjut Charles, bukanlah sebuah alasan untuk membatasi langkah-langkah dalam terus mengupayakan diplomasi parlemen. Dengan memanfaatkan teknologi, anggota-anggota parlemen dunia yang tergabung dalam IPU bisa tetap memberikan sumbangsinya pada agenda *The Fifth World Conference of Speakers of Parliament ini*. Politisi PDI-Perjuangan menekankan, parlemen bersatu dan lebih kuat menginisiasi komunitas global untuk turut aktif menemukan solusi atas berbagai permasalahan dunia.

“Institusi parlemen harus mampu beradaptasi dengan tantangan saat ini dan mampu menjalankan fungsi konstitusional secara efektif. Sebagaimana disampaikan Ketua DPR RI yang menjadi pembicara kunci di Diskusi Panel mengenai *Improving governance by bridging the gap between parliaments and the people*,” pungkask Charles. ■ es





Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar foto bersama dengan pejabat Kesenjangan DPR RI usai sidang terbuka Doktorat IPB. Foto: Jaka/MAN

Sekjen DPR Raih Gelar Doktor dari IPB

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar meraih gelar Doktor di bidang Ilmu Manajemen Bisnis dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Dalam sidang terbuka *promovendus* atau kandidat doktor memaparkan hasil disertasinya yang berjudul 'Strategi Pengembangan Kapabilitas Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi untuk Meningkatkan Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia'. Indra menjelaskan, keberadaan parlemen modern sebagai resolusi DPR RI tahun 2019 sudah menjadi kebutuhan lembaga.

Menurutnya konsep parlemen modern sudah diperlukan untuk menjawab tantangan zaman yang semakin maju dan berbasis teknologi. Secara umum, parlemen di seluruh dunia juga menghadapi tantangan yang sama akibat dampak globalisasi serta tuntutan masyarakat terhadap informasi. Parlemen modern yang ditandai dengan

keterbukaan, teknologi informasi dan representasi menjadi satu keniscayaan dengan SDM yang unggul berbasiskan teknologi informasi terkini sebagai sistem organisasi pendukung yang efektif, profesional, modern, dan mandiri.

"Setjen sebagai sistem pendukung utama DPR RI berada di bawah eksekutif dan Pimpinan DPR RI sebagai lembaga politik menjadi aktor kunci dalam mewujudkan parlemen modern didukung dengan keleluasaan dalam hal regulasi sebagai kebutuhan agar andal dalam menjalankan tugas dan fungsinya," papar Indra dalam sidang terbuka yang diselenggarakan secara virtual di Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8).

Dia juga mengungkapkan, penelitian ini menggunakan *Soft System Methodology* (SSM) serta menggunakan *Interpretive Structural Modeling* (ISM) dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) sebagai *Hard System Methodology* (HSM) menghasilkan

temuan strategi baru dalam perumusan kebijakan menggunakan pendekatan sistem berbasis organisasi masa depan yang berlandaskan kompetensi, kualitas, dan sikap kerja SDM sesuai dengan perkembangan TIK.

Terbentuknya sistem organisasi Setjen yang modern yang didukung Sumber Daya Manusia unggul dan berbasis TIK (organisasi masa depan) serta didukung regulasi (Pemerintah, Internal Renstra/RITIK) dan komitmen semua pihak yang kuat. Indikator kinerja dan kontrol sistem pendukung yang andal dan paripurna dalam mewujudkan parlemen modern tidak hanya cukup dengan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, tetapi dibutuhkan integritas penggunaan TIK antar unit serta kompetensi, kualitas dan sikap kerja SDM yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan TIK.

Sidang promosi dipimpin langsung oleh Dekan Sekolah Bisnis IPB Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, MS, penguji luar Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Prof. Dr. Chandra Wijaya, MSi, MM dan Wakil dekan SBIPB Dr. Ir. Nimmi Zulfainarini, SPI, MSi, perwakilan program studi Dr. Ir. Arif Imam Suroso, MSc, Promotor Prof. Dr. Ir. Mohamad Syamsul Ma'arif M. Eng., Dr. M. Joko Affandi S.U. dan Dr. Ir. Anggraini Sukmawati MM. ■ eko/es

Agen Perubahan sebagai *Role Model* Reformasi Birokrasi

Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Setyanta Nugraha mengingatkan bahwa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di masa sekarang tidaklah mudah. Melakukan kinerja yang baik dan cepat, berintegritas, serta tidak terjerumus masalah korupsi menjadi tuntutan yang diharapkan bisa diimplementasikan oleh seluruh ASN dan birokrat sebagai pegawai Pemerintah. Pemerintah melahirkan reformasi birokrasi untuk mencegah terjadinya penyakit birokrasi yang pernah terjadi dimasa lalu untuk jangka waktu panjang.

“Kalau kita mau mengaca atau mengenali diri kita sendiri sebagai ASN atau birokrasi, maka kita ini hasil diagnosisnya adalah sakit, jenis sakitnya yakni lambat, belum berintegritas, masih ada korupsi, pekerjaan seadanya, dan

masih banyak ditemui sikap indisipliner. Untuk mengobati penyakit birokrasi tersebut, obatnya adalah melakukan reformasi birokrasi yang dilaksanakan melalui 8 area perubahan,” ucap Totok, sapaan akrab Setyanta, dalam Diklat Agen Perubahan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama Setjen DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8).

Secara definisi, menurut Kementerian PAN-RB, tambah Totok, agen perubahan adalah individu atau kelompok terpilih yang dijadikan contoh dan panutan, baik dalam integritas maupun kinerjanya yang tinggi. “Agen perubahan dalam reformasi birokrasi berperan sebagai *role model*. Sebagai *role model* dan panutan, maka harus dijaga betul perilaku, ucapan, tindakan, dalam kesehariannya. Dalam konteks

reformasi birokrasi, kita membentuk agen perubahan sebagai jembatan untuk akselerasi dalam percepatan pelaksanaan program reformasi birokrasi,” tutur Totok.

Ia memaparkan, ada beberapa ciri-ciri yang harus dimiliki oleh seorang agen perubahan, diantaranya adalah visioner. Seorang agen perubahan harus memiliki pemikiran akan hidup dimasa depan sehingga mampu mengantisipasi apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

“Ciri kedua yaitu inspiratif. Seorang agen perubahan didorong untuk bergairah dan mampu menginspirasi orang lain. Sedangkan ciri ketiga, agen perubahan memiliki kemampuan yang kuat untuk memotivasi diri. Ciri selanjutnya, seorang agen perubahan juga harus bisa memahami orang lain,” jelas Totok. ■ dep/sf



Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Setyanta Nugraha dalam Diklat Agen Perubahan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama Setjen DPR RI. Foto: Andri/MAN

DPR Dukung Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Turki

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia-Turki Muhammad Farhan mendorong penguatan kerja sama Indonesia-Turki guna meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Menurutnya, pada masa pandemi Covid-19 selayaknya tidak menghentikan langkah diplomasi dan kerja parlemen. Sebaliknya, lanjut Farhan, di situasi tak menentu seperti saat ini, kerja sama antar negara semakin dibutuhkan.

Demikian disampaikan Farhan usai menerima Duta Besar Turki untuk Indonesia Prof. Dr. Mahmut Erol Kilic di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8). Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Anggota BKSAP DPR RI Zulfikar Hamonangan dan Direktur Eropa 3 Kementerian Luar Negeri Masni Eriza.

Farhan menuturkan, dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak menegaskan kembali dukungan untuk penguatan kerja sama antara kedua negara, diantaranya kerja sama

pertahanan, perdagangan, dan pendidikan. “Yang pasti kita harus berfokus pada kerja sama yang akan meningkatkan nilai industri pertahanan dalam negeri,” ujar politisi F-NasDem ini.

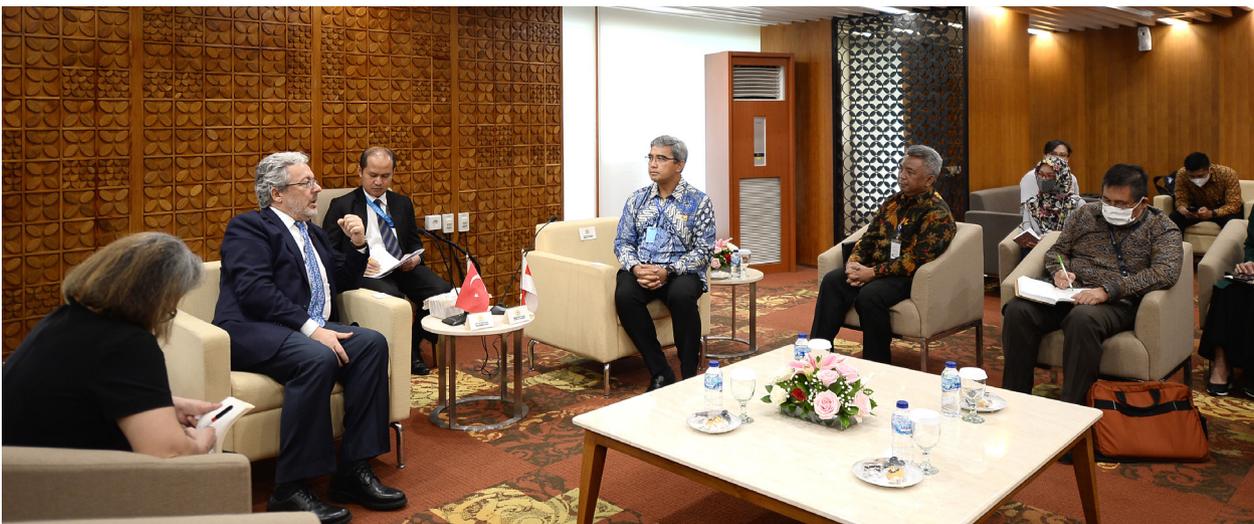
Menurut Farhan, Indonesia-Turki sudah memiliki *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang Kerja Sama Industri Pertahanan sejak 2010, diantaranya pengadaan alutsista. Keduanya sudah berhasil mengembangkan tank Harimau (Medium Weight Tank), yang merupakan kerja sama antara PT. Pindad dengan FNSS Turki.

Kendati demikian, terkait kerja sama militer, Farhan menuturkan akan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Pemerintah. “Kerja sama militer, kita sama-sama *secure* bahwa kerja sama militer Indonesia-Turki hanya melalui satu pintu, yaitu melalui masing-masing Kementerian Pertahanan. Buat saya, yang bertugas di Komisi I, ini jadi lebih mudah karena kita tahu bahwa

hanya cukup satu jalur yang kita awasi,” jelas Farhan.

Sementara itu, terkait skema kemitraan perdagangan komprehensif IT-CEPA, baik Turki maupun Indonesia, keduanya berharap pembahasan tersebut dapat segera diselesaikan dan diajukan ke Parlemen untuk diratifikasi. “Indonesia-Turki CEPA ini kita harapkan dapat segera terwujud untuk membantu persaingan kita dengan negara-negara lain,” kata Farhan lebih lanjut.

Dikatakannya, implementasi IT-CEPA dapat menjadi solusi tarif yang merupakan salah satu *bottleneck* peningkatan nilai perdagangan antara kedua negara. Ke depan, GKSB juga akan mendorong peningkatan jumlah pelajar Indonesia di Turki. Mengingat, jumlah pelajar Indonesia di Turki baru ada 1.600 orang. Jumlah tersebut masih sedikit jika dibandingkan jumlah mahasiswa Indonesia di negara lain. Padahal, Turki sebagai negara industrialisasi sudah cukup maju dan layak diperhitungkan. ■ ann/sf



Ketua GKSB Indonesia-Turki Muhammad Farhan berdiskusi dengan Duta Besar Turki untuk Indonesia Prof. Dr. Mahmut Erol Kilic. Foto: Andri/MAN



Suasana pelantikan Anggota DPR RI Pengganti Antar Waktu (PAW) Haerul Saleh pada Rapat Paripurna DPR RI. Foto: Eno/MAN

Anggota PAW dari F-Gerindra Dilantik

Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 melantik satu Anggota DPR RI Pengganti Antar Waktu (PAW) Haerul Saleh dari Fraksi Partai Gerindra. Haerul Saleh dilantik menggantikan rekan separtainya, M. Imran yang wafat akibat sakit yang dideritanya beberapa waktu yang lalu. Haerul merupakan calon legislatif pemenang suara terbanyak kedua yang berasal dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara.

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin sebelumnya meminta persetujuan pada seluruh Anggota Dewan untuk mendahulukan agenda pelantikan Anggota PAW sebelum dilanjutkan agenda lain. "Maka berdasarkan hal tersebut, kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah paripurna dapat kami dahului dengan pelantikan PAW DPR RI, bisa disepakati?" yang selanjutnya disetujui oleh seluruh Anggota Dewan yang hadir.

Menggunakan tata cara pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8), Haerul mengucapkan sumpah jabatan sebagai Anggota yang dipandu langsung oleh Azis. Ia menekankan bahwa sumpah jabatan Anggota merupakan tanggung jawab Anggota PAW terpilih kepada Tuhan, Bangsa, dan Negara.

"Patut saya ingatkan, sumpah yang saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Bangsa, Negara Republik Indonesia. Tanggung jawab menjaga dan memelihara Pancasila dan UUD 1945, yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Apakah saudara bersedia?" tanya Azis, yang disusul dengan ucapan tegas "Bersedia" dari Haerul Saleh. ■ er/sf

